

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

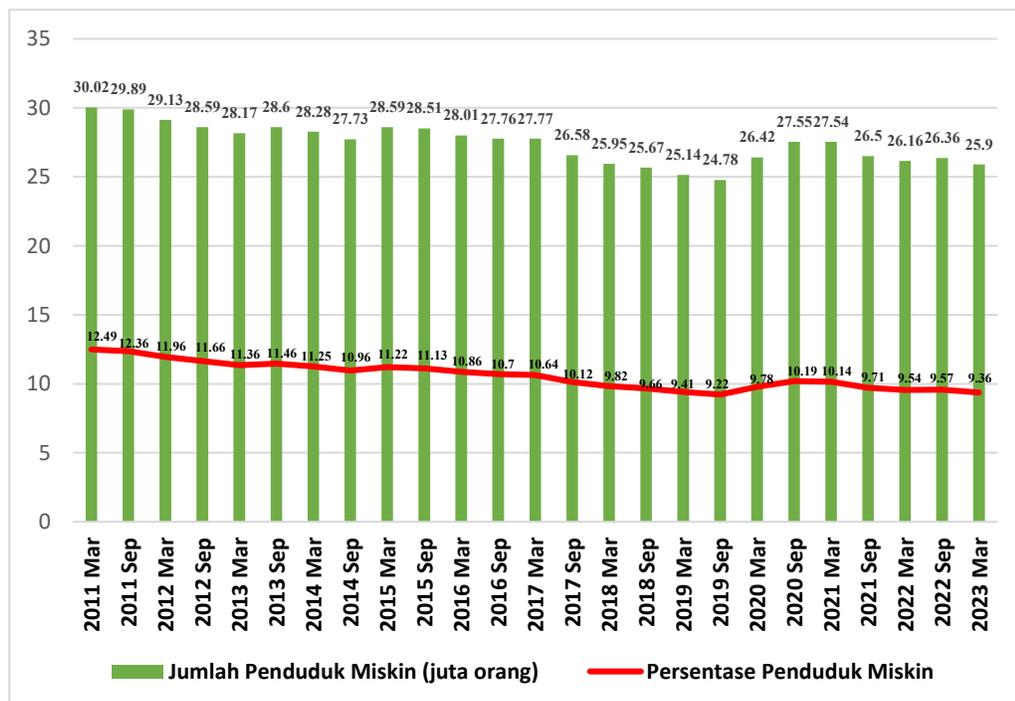
Kemiskinan adalah salah satu tantangan mendasar yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini mencerminkan ketidakmampuan suatu negara dalam menyediakan standar hidup yang layak bagi seluruh warganya. Meskipun berbagai cara telah digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, tantangan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi tetap menjadi persoalan yang serius. Menurut Suryawati (2005), kemiskinan adalah situasi di mana individu atau kelompok mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, seperti asupan makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang memadai, serta kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar ini tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Masruroh (2021), kemiskinan terjadi akibat ketidakmampuan sebagian orang untuk mencapai taraf hidup yang layak. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya mutu sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, strategi pembangunan Indonesia menitikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan (Purnama, 2017).

Untuk mengukur dan memahami kemiskinan secara lebih terstruktur, konsep tingkat kemiskinan menjadi indikator kunci dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat kemiskinan umumnya diukur berdasarkan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi standar

kebutuhan hidup tertentu. Dalam analisis ekonomi dan sosial, kemiskinan sering dibagi ke dalam beberapa kategori utama: kemiskinan absolut, kondisi di mana pendapatan individu berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; kemiskinan relatif, kemiskinan akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata, menimbulkan kesenjangan pendapatan.; kemiskinan kultural: yang muncul dari pola pikir atau budaya yang tidak mendorong upaya perbaikan kondisi hidup; dan kemiskinan struktural: adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, yang terjadi dalam sistem yang kurang mendukung pengentasan kemiskinan (Suryawati, 2005).

Dalam konteks Indonesia, tingkat kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun, terlepas dari peningkatan ekonomi yang signifikan, Indonesia terus menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi kemiskinan, yang tercermin di berbagai provinsi dan kota di seluruh negeri.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

### **Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2011–2023. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 30,02 juta jiwa, atau sekitar 12,49% dari total populasi, yang merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.

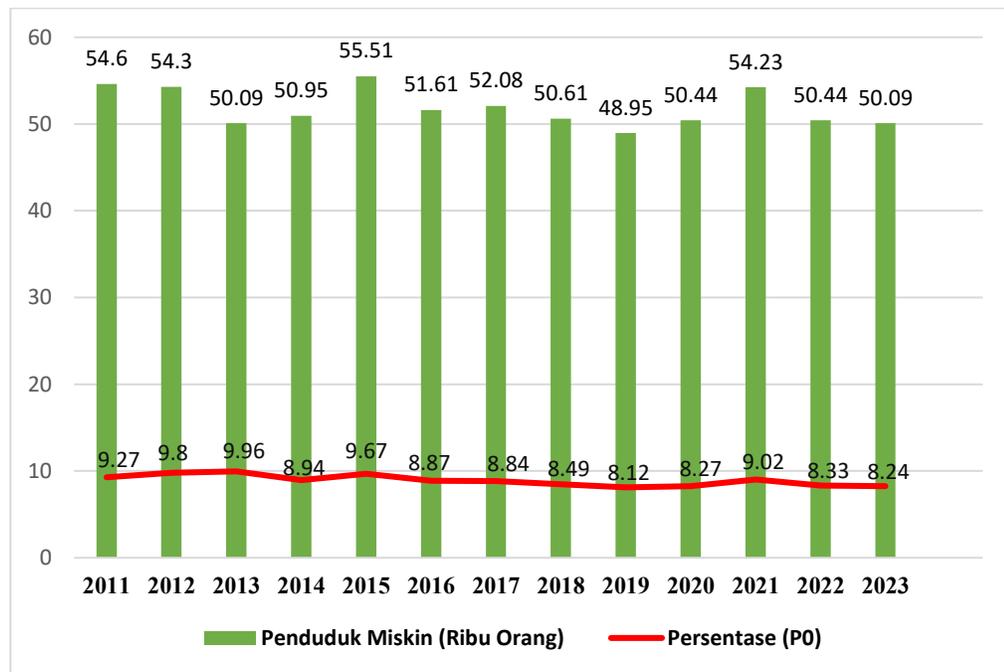
Seiring dengan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, jumlah tersebut mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2019, dengan 24,78 juta jiwa atau 9,22% dari total populasi. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program-program sosial dan ekonomi yang diterapkan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan jumlah penduduk miskin menjadi 27,55 juta jiwa (10,19%), yang menunjukkan dampak serius terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir telah membantu menurunkan kembali angka kemiskinan secara bertahap. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 25,90 juta jiwa atau 9,36%, menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten, meskipun belum mencapai tingkat sebelum pandemi.

Kota Jambi dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jambi. Kota ini memiliki 17 sektor ekonomi yang berkembang secara bersamaan, mencerminkan dinamika pertumbuhan yang lebih kompleks dibandingkan kabupaten yang masih didominasi oleh sektor-sektor tertentu, seperti pertanian dan perkebunan.

Sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jambi, Kota Jambi memberikan kontribusi yang lebih besar dalam sektor industri, perdagangan, dan jasa, yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi perkotaan. Namun, meskipun sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan, masyarakat miskin masih menghadapi

keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih produktif. Banyak dari mereka tetap bergantung pada sektor tradisional dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah, sehingga menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kemiskinan terus berlanjut karena kelompok berpendapatan rendah kesulitan keluar dari keterbatasan ekonomi yang ada.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

**Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Jambi 2011- 2023**

Jika dilihat pada tingkat daerah, khususnya Kota Jambi, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang signifikan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,27% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 54,60 ribu jiwa. Tren ini mengalami fluktuasi hingga mencapai tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2015 dengan 9,67%, atau setara dengan 55,51 ribu jiwa. Meski jumlah penduduk miskin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa persentase kemiskinan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk struktur populasi dan perekonomian.

Penurunan signifikan terjadi hingga tahun 2019, di mana tingkat kemiskinan mencapai angka terendah sebesar 8,12% dengan jumlah penduduk miskin 48,95 ribu jiwa. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 memberikan dampak signifikan, meningkatkan angka kemiskinan menjadi 8,27% dengan 50,44 ribu jiwa penduduk miskin. Tahun-tahun berikutnya mencatat fluktuasi lebih lanjut, di mana tingkat kemiskinan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 9,02%, lalu menurun secara bertahap hingga 8,24% pada tahun 2023.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Jambi masih menghadapi tantangan besar untuk mengatasi kemiskinan secara konsisten. Pandemi COVID-19, ketimpangan distribusi ekonomi, dan keterbatasan kebijakan redistribusi menjadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan angka kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi masih belum merata, sehingga kelompok masyarakat miskin belum sepenuhnya menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi.

Dinamika pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kota Jambi mencerminkan tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor menjadi kunci untuk memahami arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Setiap sektor, mulai dari pertanian hingga industri dan jasa, memiliki peran penting dalam membentuk ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, sehingga turut meningkatkan tingkat kesejahteraan dan akumulasi kekayaan suatu negara. Kontribusi sektor usaha juga terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh produk regional bruto (PDRB), yang menentukan nilai tambah bruto dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah.

Pemerintah daerah harus memprioritaskan kebijakan yang meningkatkan potensi ekonomi dari industri-industri utama yang berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ekonomi daerah (Rini, 2006).

Dalam teori dualisme ekonominya, Lewis (1954) menegaskan bahwa migrasi tenaga kerja dari sektor tradisional yang produktivitasnya rendah seperti pertanian ke sektor kontemporer yang produktivitasnya tinggi seperti sektor industri dan jasa adalah hal yang mengarah pada kemajuan ekonomi. Di sektor kontemporer, perpindahan tenaga kerja ini mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kuznets (1955) dalam teorinya mengenai transformasi struktural menyatakan bahwa pembangunan ekonomi biasanya ditandai dengan perubahan struktur perekonomian, di mana kontribusi sektor primer (pertanian) akan berkurang dan digantikan oleh sektor sekunder (industri) serta sektor tersier (jasa) seiring dengan peningkatan PDRB. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan sering kali meningkat karena sektor-sektor yang lebih produktif berkembang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor tradisional. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi keuntungan di sektor-sektor modern, sementara sektor tradisional seperti pertanian masih didominasi oleh pekerja dengan pendapatan rendah. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi, ketimpangan ini cenderung menurun ketika manfaat dari pertumbuhan ekonomi mulai menyebar secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Teori Tahap Pertumbuhan Rostow (1960), perekonomian suatu daerah atau negara melewati lima tahap: (1) Masyarakat Tradisional, (2) Prakondisi Lepas Landas, (3) Lepas Landas, (4) Menuju Kedewasaan, dan (5) Konsumsi Massal. Dalam konteks pertumbuhan sektoral, tahap lepas landas (take-off) ditandai dengan percepatan pertumbuhan di sektor-sektor tertentu yang mendasari pembangunan ekonomi, seperti industri, infrastruktur, dan sektor-sektor produktif lainnya, yang mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap

ekonomi secara keseluruhan. Namun, jika tahap ini tidak diikuti oleh distribusi yang merata, maka sektor-sektor tradisional seperti pertanian akan mengalami stagnasi, dan ketimpangan pendapatan akan meningkat.

Selain itu, Teori *Endogen* Pertumbuhan yang dikemukakan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) menekankan bahwa pertumbuhan dalam sektor-sektor spesifik bisa didorong oleh investasi dalam modal manusia, teknologi, dan inovasi. Mereka menyatakan bahwa sektor-sektor yang memiliki investasi tinggi dalam pendidikan dan teknologi cenderung pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor-sektor tradisional yang lebih padat karya. Investasi dalam teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas, sementara pendidikan memperbaiki kualitas tenaga kerja, sehingga menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar global. Modal manusia yang berkualitas tinggi memainkan peran kunci dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing di pasar internasional, sementara sektor-sektor tradisional yang kurang berinvestasi dalam inovasi sering kali tertinggal.

Akibatnya, perbedaan kecepatan pertumbuhan di antara sektor-sektor ini dapat menyebabkan disparitas ekonomi, terutama dalam distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Sektor-sektor dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti jasa keuangan atau industri teknologi, cenderung memberikan peluang pendapatan yang lebih baik bagi tenaga kerja terampil, sementara sektor-sektor tradisional, seperti pertanian dan pertambangan, mungkin tidak mampu mengimbangi ketertinggalan, sehingga tenaga kerja tidak terampil tetap terjebak dalam pekerjaan berupah rendah. Ketidakmerataan ini pada akhirnya memperburuk ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan menimbulkan tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Setelah memahami konsep teoritis mengenai pertumbuhan ekonomi sektoral dan transformasi ekonomi, selanjutnya pembahasan diarahkan pada kontribusi sektor-sektor ekonomi di Kota Jambi terhadap *Produk Domestik*

*Regional Bruto* (PDRB). Kontribusi ini mencerminkan dinamika pertumbuhan di berbagai sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus, penelitian ini menyajikan data pertumbuhan PDRB sektoral Kota Jambi dalam periode lima tahun terakhir, yaitu 2019 hingga 2023. Rentang waktu ini dipilih karena mewakili kondisi terkini serta mencakup masa sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19, sehingga memungkinkan analisis yang lebih relevan terhadap dinamika sektoral di era pemulihan ekonomi. Meskipun cakupan penelitian meliputi tahun 2011–2023, pembatasan pada 5 tahun terakhir dilakukan agar penyajian data lebih ringkas tanpa mengurangi kualitas analisis terhadap tren dan tantangan sektoral. Tabel berikut menunjukkan variasi pertumbuhan antar sektor di Kota Jambi selama periode tersebut.

**Tabel 1. 1 PDRB Sektoral Kota Jambi Tahun 2011-2023**

Sektor PDB	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.61	-0.66	-12.12	1.23	1.45
B. Pertambangan dan Penggalian	-1.43	3.75	2.54	-0.15	-9.07
C. Industri Pengolahan	2.74	-1.14	1.76	3.55	0.5
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.43	2.1	6.48	10.4	12.1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.8	-3.1	4.95	4.25	2.19
F. Konstruksi	7.39	-1.12	5.04	-0.93	6.23
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.93	-5.73	6.89	5.45	11.17
H. Transportasi dan Pergudangan	1.8	-23.12	1.51	16.91	10.28
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.54	-6.59	3.15	23.34	10.5
J. Informasi dan Komunikasi	6.45	8.98	3.99	9.04	7.25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.67	9.84	4.7	-0.83	0.42
L. Real Estate	7.46	-0.32	3.19	4.38	3.03
M.N. Jasa Perusahaan	2.15	-5.58	1.48	19.12	16.77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.5	-6.8	1.23	-0.58	2.33
P. Jasa Pendidikan	7.75	3.3	0.16	2.93	2.3
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.94	6.91	18.16	-2.24	4.13
R.S.T.U. Jasa lainnya	4.41	-3.48	0.85	9.86	7.93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Sektor Pertambangan dan Penggalan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dengan puncak pertumbuhannya pada tahun 2011 mencapai 8,69%. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh tingginya permintaan komoditas, khususnya batu bara. Namun, sektor ini menurun drastis pada tahun pada tahun 2015 sebesar -31,34%, yang dapat dijelaskan oleh fluktuasi harga global batu bara dan penurunan permintaan dunia akan komoditas tersebut. Sebagai sektor yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global, fluktuasi harga batu bara memiliki dampak besar terhadap sektor pertambangan di Jambi, menjelaskan penurunan drastis yang terjadi pada periode tersebut. Penurunan ini turut memperlihatkan kerentanannya terhadap perubahan kondisi pasar global, tetapi sektor ini kembali menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan moderat setelahnya.

Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan luar biasa pada tahun 2013, dengan angka mencapai 27,58%. Peningkatan ini menunjukkan tingginya aktivitas proyek-proyek infrastruktur yang didorong oleh pembangunan fisik dan infrastruktur besar di Kota Jambi pada periode tersebut. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ini termasuk investasi pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan kota dan kawasan ekonomi baru. Namun, sektor konstruksi terpengaruh oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi sebesar -1,12% pada tahun 2020. Pembatasan sosial yang diberlakukan selama pandemi menyebabkan tertundanya banyak proyek infrastruktur dan pembatasan aktivitas lapangan konstruksi. Meskipun demikian, sektor konstruksi mulai pulih setelah tahun 2020, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam ekonomi Kota Jambi. Pemulihan tersebut mencerminkan keberlanjutan proyek infrastruktur dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi, dengan sektor konstruksi kembali memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan puncak pertumbuhannya pada tahun 2015 mencapai 12,13%. Pada tahun tersebut, meningkatnya daya beli masyarakat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan konsumsi, berperan dalam meningkatkan kinerja sektor ini. Namun, seperti sektor-sektor lainnya, sektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, dengan angka penurunan sebesar -5,73%. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan sosial yang diterapkan untuk menanggulangi pandemi, yang sangat berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Toko-toko tutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, yang menyebabkan penurunan dalam penjualan dan perdagangan barang. Namun, sektor ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah pembatasan dilonggarkan, mencerminkan tren positif dan pertumbuhan konsumsi masyarakat pasca-pandemi.

Data pertumbuhan ekonomi sektoral di Kota Jambi menunjukkan variasi signifikan di antara sektor-sektor utama, di mana beberapa sektor, seperti perdagangan besar dan eceran, mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID19. Meskipun sektor ini tumbuh hingga 12,13% pada tahun 2015, penurunannya sebesar -5,73% pada tahun 2020 mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh aktivitas ekonomi dalam menghadapi pembatasan mobilitas dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Perbedaan kinerja ini dapat memberikan wawasan penting ketika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi sektoral dan tingkat kemiskinan.

Masruroh (2021) meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi sektoral dan jumlah penduduk miskin. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penurunan kemiskinan tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sektoral, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain

seperti distribusi pendapatan yang merata serta kemudahan akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, Nainggolan (2020) menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitiannya, hanya tingkat pengangguran yang terbukti memiliki dampak signifikan terhadap angka kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh langsung dalam menurunkan kemiskinan di daerah tersebut.

Wishartama et al. (2021) meneliti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sektoral tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Bahkan, pada beberapa sektor, pertumbuhan ekonomi justru memperbesar ketimpangan yang ada, sehingga memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Melihat dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi sektoral dan tingkat kemiskinan di Kota Jambi, muncul ketertarikan untuk menelusuri apakah terdapat hubungan kausalitas di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi sektoral dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan, atau justru kondisi kemiskinan yang tinggi menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan di beberapa sektor. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa kedua faktor tersebut saling memengaruhi dalam hubungan timbal balik yang kompleks.

Beberapa sektor di Kota Jambi seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta industri pengolahan tercatat memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa pendidikan, serta jasa perusahaan juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup menjanjikan. Meskipun demikian, tantangan dalam hal pemerataan manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih menjadi

persoalan. Ketimpangan dalam distribusi manfaat ini berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan, khususnya di kalangan masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor yang mengalami kontraksi seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Penurunan kinerja sektor-sektor tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi tersebut.

Hal ini diperkuat dengan Penelitian Zulgani dan Zevaya (2021), yang menggunakan Inclusive Growth Index (IGI) yang meliputi indikator infrastruktur ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, dan kesehatan, menemukan adanya kesenjangan signifikan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya ketidakmerataan dalam pertumbuhan antar sektor, penting untuk memahami bagaimana kinerja masing-masing sektor berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **Kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi sektoral dengan tingkat kemiskinan di Kota Jambi selama periode 2011-2023?
2. Sektor ekonomi manakah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi selama periode 2011-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Atas dasar masalah yang diidentifikasi tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi sektoral dengan tingkat kemiskinan di Kota Jambi selama periode 2011-2023.
2. Mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi selama periode 2011-2023.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis: Menambah wawasan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi sektoral dan kemiskinan di daerah perkotaan, khususnya Kota Jambi, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan bagi pengambil kebijakan untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki pengaruh.